

ABSTRAK

Kawasan air yang besar merupakan tanggungjawab besar dalam mengurus dan mengamanakannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, ia memerlukan kekuatan dan kemampuan di sektor maritim dalam bentuk teknologi dan alat marin moden serta sumber daya manusia yang dapat dipercayai untuk menguruskan sumber-sumber yang terdapat di dalamnya. Tanpa pemerhatian bersepadu yang memadai, lokasi geografi strategis Indonesia membuka peluang pengeboman nelayan ilegal dan eksploitasi sumber laut oleh pihak-pihak yang membahayakan negara jika kapasiti pengawasan terbatas. Objektif penelitian ini adalah (1) Untuk menentukan apakah penangkapan ikan yang dilakukan oleh penduduk perairan Jayapura sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (2) Untuk menentukan dampak sosial akibat penegakan hukum penangkapan ikan secara haram oleh komuniti akuatik Jayapura yang dijalankan oleh pegawai penguatkuasa di Jayapura. Kaedah penyelidikan ini menggunakan pendekatan yuridis empirikal, bertujuan untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan bahan undang-undang dari data sekunder dengan data primer yang diperoleh yang diperoleh di lapangan.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat perairan Jayapura rata-rata sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan semua nelayan mengerti hukum yang akan terjadi apabila melakukan pelanggaran, Tetapi di pihak lain masih memanfaatkan kondisi dengan berkurangnya pengawasan dari personil kepolisian perairan, sehingga nelayan secara sembunyi masih menggunakan alat penangkapan bom untuk mendapatkan hasil ikan yang lebih banyak. Penetapan Penegakan hukum dengan patroli setiap malan berdampak kasus ilegal seperti pengeboman ikan menjadi berkurang.

Kata kunci: Kasus Ilegal, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The large area of water is a big responsibility in managing and securing it. To secure such a vast sea, it requires strength and capability in the maritime sector in the form of modern marine technology and tools as well as reliable human resources to manage the resources contained therein. Without adequate integrated observation, Indonesia's strategic geographic location opens up opportunities for illegal fishing bombing and exploitation of marine resources by parties that harm the state if surveillance capacity is limited. The objectives of this study are (1) To determine whether the fishing carried out by the people of Jayapura waters is in accordance with Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, (2) To determine the social impact due to law enforcement of illegal fishing by the aquatic community. Jayapura which is carried out by law enforcement officials in Jayapura.

This research method uses an empirical juridical approach, aims to analyze the problem by combining legal materials from secondary data with primary data obtained in the field.

The results of this study reveal that fishing carried out by the people of Jayapura waters on average is in accordance with the provisions in Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and all fishermen understand the law that will occur if they commit a violation, but on the other hand they still take advantage of the condition with reduced supervision. from the marine police personnel, so that fishermen still secretly use bomb-catching tools to get more fish. The hope of law enforcement by patrolling every night has the effect of reducing illegal cases such as fish bombing.

Keywords: Illegal Cases, Law Enforcement